



DOK. GATRA/BEAVIHARTA

DISTRORSI HUBUNGAN

## Melawan Ekstremisme Menuai Kesesatan

Intelektual Islam Indonesia sudah lama merintis gagasan Islam liberal. Dianggap gagal karena terlalu elitis, tidak mengakar di masyarakat.

SETIAP Kamis pukul 15.30, dialog bertajuk "Islam Liberal" mengudara di radio 68H, Jakarta. Acara setengah jam ini direlay 15 stasiun radio ke berbagai daerah. Yang jadi narasumber adalah para tokoh intelektual Islam liberal, seperti Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, dan Masdar F. Mas'udi. Pemandunya, Ulil Abshar Abdalla, Ketua Komunitas Islam Utan Kayu. Pendengar boleh urun rembuk melalui telepon.

Suguan topiknya beragam, dari masalah sosial, emansipasi, sampai demokrasi. Ternyata, respons pada program ini luar biasa, baik yang mendukung maupun yang menentang. Misalnya, kata Ulil, ketika masalah syariat Islam dijadikan topik utama, seorang pendengar protes: "Kenapa sih Anda sebagai orang Islam tidak sepakat menerapkan syariat Islam di Indonesia."

Kata Ulil, mengutip para tokoh itu, "Islam liberal tidak menentang kehen-

dak umat Islam, tapi aspirasi itu harus diproses secara demokratis." Sebab, yang penting, menurut peneliti Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama ini, penerapan syariat Islam itu tidak dipaksakan. Aspirasi itu harus diajukan dulu ke dewan legislatif dan dapat persetujuan kelompok agama lain.

Cara pandang Islam liberal ini memang bertumpu pada demokrasi di Barat. Liberalisme itu sendiri merupakan filosofi yang muncul di Eropa pada pergolakan kelas menengah kala menentang hak-hak khusus pihak kerajaan, aristokrat, dan kaum gereja. Lalu, ia berubah menjadi gerakan yang memicu terjadinya Revolusi Prancis dan Amerika.

Tidak aneh, Charles Kurzman, editor buku *Liberal Islam: A Sourcebook* (1998), mengakui bahwa istilah liberal mengandung konotasi negatif. "Ia diasosiasikan dengan dominasi asing, kapitalisme tanpa batas, dan kemunafikan yang mendewakan kebenaran," tulisnya. Menurut dia, Islam liberal harus dilihat sebagai alat bantu analisis, bukan kategori yang mutlak.

Islam liberal lahir, menurut sosiolog dari University of North Carolina, Amerika Serikat, itu, berakar pada Syah Waliyullah (1703-1762) dari India. Setelah itu, bermunculan tokoh Islam liberal, seperti Jamaluddin Al-Afghani (1838-1897) di Afghanistan, Sayyid Ahmad Khan (1817-1898) di India, dan Muhammad Abduh (1849-1905) di Mesir.

Para tokoh Islam liberal itu, menurut Kurzman, berpendapat bahwa keyakinan agama tidak boleh menduga-duga dan merasa puas dengan semata-mata *taklid* (mengikuti) terhadap para pendahulunya. Berbeda dengan kelompok Wahabi — dalam kategori Kurzman disebut "Islam revivalis" — yang lebih tertuju menentang tradisi, takhayul, dan mitologis, tapi kurang mengurus doktrin Islam.

Posisi Islam liberal, menurut dia, berlawanan dengan Islam revivalis yang berusaha mengembalikan kemurnian Islam seperti di zaman Rasulullah. Tapi, ia tidak ramah dengan kehadiran modernitas. Ia tidak menimba hasil dari modernitas, kemajuan ekonomi, demokrasi, dan hak-hak hukum. Islam liberal menghadirkan masa lalu Islam untuk kepentingan modernitas. Ia menghargai rasionalitas.

Gagasan Islam liberal di Indonesia sempat dilindungi Nurcholish Madjid melalui pembaruan Islam pada 1970-an. Kala itu, Cak Nur — panggilan akrabnya — mengangkat ide sekularisasi. Gagasan ini, menurut dia, merupakan

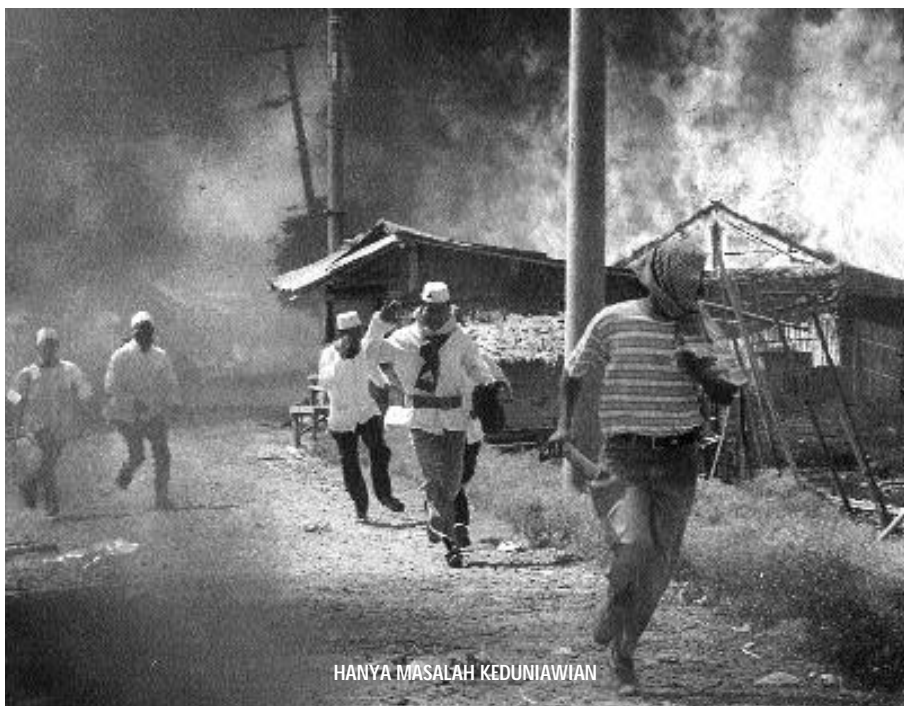
konsekuensi logis dari monoteisme Islam (tauhid). Sekularisasi tidak dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme. Proses pembebasan ini diperlukan karena umat Islam, dalam perjalanannya, tak lagi sanggup membedakan mana nilai yang Islami, mana yang transendental, dan mana pula yang temporal.

Karena itu, Cak Nur menilai, konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Menurut dia, negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya rasional. Sedangkan agama merupakan dimensi spiritual dan pribadi.

Kala itu, reaksi keras bermunculan. Dari kalangan cendekiawan muslim, antara lain, Amien Rais, Endang Saefuddin Anshari, Rasyidi, dan Deliar Noer. Menurut Amien, yang kala itu masih menjadi staf pengajar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, di dalam Al-Quran dan sunah memang tidak ada dalil yang menyatakan untuk mendirikan negara Islam.

Tapi, menurut tokoh Muhammadiyah itu, mendirikan negara tidak bisa lepas dari konteks ajaran Islam. Pemisahan antara agama dan negara, kata Amien, merupakan paham sekuler yang dikenal dalam perilaku seorang muslim. Padahal, untuk menjalankan syariat Islam, dibutuhkan kekuasaan politik.

Perbedaan orientasi politik ini dipetakan menjadi berbagai model pemikiran. Antara lain, cara pengelompokannya didasarkan pada pemikiran tokoh, bukan organisasi keagamaan. Beberapa peneliti berbeda dalam mengelompokkan para intelektual tersebut. Misalnya, Masykuri Abdillah dalam bukunya, *Demokrasi di Perimpangan Makna* (1999), hanya memba-



DIMAS ARDIAN

## Gagasan Islam liberal bisa saja muncul dari Muhammadiyah — yang dianggap sebagai kelompok modernis— atau Nahdlatul Ulama sebagai kelompok tradisional.

ginya jadi tiga kelompok: konservatif, modernis, dan sekuler.

Pertama, kelompok konservatif adalah kelompok yang mempertahankan integritas antara Islam dan negara. Mereka tetap mempertahankan tradisi praktek dan pemikiran politik Islam klasik/pertengahan seperti pemikiran Rasyid Ridha. Ter-

masuk di dalamnya adalah kelompok tradisional. Ada pula kelompok yang ingin mereformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam dan menolak sistem yang dibuat manusia, yang disebut fundamentalis. Pengaruhnya datang dari pemikiran Sayyid Qutb, Abul A'la Maududi, dan Hasan Turabi.

Kelompok kedua disebut modernis. Mereka percaya, Islam hanya mengatur dasar-dasar masalah keduniaan (kemasyarakatan), tapi secara teknis bisa mengadopsi sistem lainnya. Aliran ini dibawa Muhammad Abduh, Husein Haikal, dan Muhammad Assad.

Ketiga, kelompok sekuler yang ingin memisahkan antara Islam dan negara. Dalam pandangan mereka, Islam tidak mengatur masalah keduniaan —sebagaimana praktek kenegaraan yang terjadi di Barat. Aliran pemikiran ini dilontarkan Ali Abdulraziq dan Thaha Husein.

Nah, menurut Ulil Abshar Abdalla, kategori Islam liberal di antara pengelompokan ini lebih ditentukan oleh gagasannya. Gagasan Islam liberal bisa saja muncul dari Muhammadiyah —yang dianggap sebagai kelompok modernis— atau Nahdlatul Ulama sebagai kelompok tradisional. Dua organisasi Islam



DEKLARASI MAJELIS MUJAHIDIN

SUJICO

terbesar di Indonesia ini sama-sama menentang paham negara agama (teokrasi).

Tokoh Islam liberal yang dianggap paling kuat pengaruhnya terhadap orientasi pemikiran intelektual di Indonesia adalah Muhammad Abduh. Kendati dididik secara tradisional dan berguru pada beberapa ulama Universitas Al-Azhar, yang sebagian besar bersikap konservatif, Abduh menunjukkan dirinya sebagai intelektual yang terbuka dan progresif.

Abduh dipercaya menjadi Mufti Agung Mesir. Ia bisa dipandang sebagai seorang ulama yang mempertahankan orisinalitas Islam, sekaligus intelektual modernis yang liberal. Misalnya, selama menjadi mufti, ia mengeluarkan fatwa kontroversial. Yaitu, halalnya bunga bank dan daging hasil sembelihan orang-orang nonmuslim.

Tidak mengherankan bila murid-murid Abduh terpecah menjadi dua kelompok besar. Ada kelompok Abduh al-Yamāna (kelompok kanan), yang cenderung mengembangkan pemikiran-pemikiran keagamaannya. Ada pula kelompok Abduh al-YasĒrā (kelompok kiri), yang lebih berusaha mengembangkan gagasan-gagasan modern.

Kelompok kanan itu, antara lain, Muhammad Rasyid Ridha dan Shakib Arselan. Kelompok ini menjadi lebih fundamental pada Hassan al-Banna dan Sayyid Qutb. Merekalah yang kemudian melahirkan gerakan Ikhwan al-Muslimun dan kelompok-kelompok Islam garis keras lainnya, seperti Hizb al-Tahrir.

Sementara itu, Qasim Amin dan Ali Abd al-Raziq dianggap sebagai murid Abduh beraliran kiri. Kelompok kiri mencapai puncaknya pada diri Hasan Hanafi, sebagai penggagas Islam kiri. Kemudian berkembang menjadi tokoh sekuler yang radikal, seperti Fuad Zakariya, Zaki Najib Mahmud, dan Ahmad Said.

Pemikiran kelompok kiri, yang bisa disebut Islam liberal, di kawasan Arab mengalami perkembangan cukup pesat. Murid-murid dan simpatisan Abduh yang berkecenderungan kiri makin menyebar, tak terbatas di kawasan timur Arab, melainkan juga meluas hingga ke barat seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair.

Tapi, menurut Lutfi Assyaukanie, dosen filsafat dan sejarah pemikiran Islam di Universitas Paramadina Mulya, Jakarta, ruang gerak Islam liberal sebetulnya mengalami hambatan. Ia tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Bahkan cenderung mengalami konflik serius, karena berbenturan dengan otoritas agama dan masyarakat.



SIDANG KONSTITUANTE TAHUN

DOK. GATRA/ANIZAR M. JASMINE

## Postrā Mengais Makna

**H**EBOH wacana Islam liberal mendorong kaum muda Islam tradisional mencari identitas diri. Kategori Islam liberal dirasa kurang pas untuk memotret liberalisme pemikiran mereka. Begitu pula disertasi Greg Barton di Universitas Monash, Australia, yang menempatkan Abdurrahman Wahid — "patron" Islam tradisional — dalam barisan Islam liberal, bersama Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, dan Djohan Effendy, mereka nilai keliru.

Maka, pada Maret 2000, Institute for Social Institutions Studies (ISIS) Jakarta, salah satu kantong kegiatan anak muda Islam tradisional, menggelar serial diskusi bertajuk "Kecenderungan Liberal di NU". Kebetulan, mereka banyak yang berakar dari kultur Nahdlatul Ulama (NU). Dari sana, teretuslah istilah Post Tradisionalisme Islam (Postra) sebagai label gerakan.

M.M. Billah, pembicara dalam diskusi itu, sebenarnya keberatan dengan istilah Postra. Pasalnya, Postra tidak ada di kamus dan tidak jelas maksudnya. Meski masih diperdebatkan, istilah ini terus bergulir. Mei 2000, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Yogyakarta, sebuah penerbit buku-buku keagamaan kritis terkemuka yang dikelola anak-

anak muda NU, merumuskan rencana strategis lembaganya dan menjadikan Postra sebagai landasan ideologis.

LKIS memajukan istilah "Post Tradisionalisme Islam" sebagai judul terjemahan buku Muhammad Abed Al Jabiri, yang mereka terbitkan pada Agustus 2000. Judul itu terasa aneh. Sebab, isi buku sama sekali tidak menyinggung istilah tersebut. Penerjemahnya, Ahmad Baso, yang menulis pengantar panjang, juga tidak menyebut istilah Postra.

Baso malah memakai istilah postmodernisme.

Tiga bulan kemudian, dua peneliti ISIS, Muhammad Hanif Dzakiri dan Zaini Rachman, menerbitkan buku berjudul *Post Tradisionalisme Islam Menyingkap Corak Pemikiran dan Gerakan PMII*, November 2001. Mereka seakan hendak mematenkan Postra sebagai predikat bagi corak pemikiran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kantong anak muda NU dari unsur mahasiswa.

Pada akhir buku itu, Baso menulis epilog bertajuk "Dari Islam Liberal ke Post Tradisionalisme Islam". Ia seperti hendak membayar utang penjelasan yang





WISNU PRABOWO

BERUSAHA MENGEMBANGKAN GAGASAN MODERN



tidak ia tuangkan dalam buku Al Jabiri, tentang apa itu Postra. Sayang, formulasi Postra pada buku itu terasa masih mentah.

Gayung pun bersambut. Pada Juli 2001, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU menindaklanjuti pencarian basis metodologis untuk

Postras, sebagai mazhab pemikiran. Lagi-lagi, pelopornya anak-anak muda NU. Jurnal Lakpesdam, *Tas-hwirul Afkar*, waktu itu mengangkat tema utama "Post Tradisionalisme Islam: Ideologi dan Metodologi". Di sini, sosok Postra mulai terlihat.

Marzuki Wahid, redaktur *Afkar*, menulis bahwa istilah Postra muncul untuk menunjang gerakan pemikiran dengan ciri-ciri khusus yang tidak bisa dibaca dengan kategori tradisional, neo-tradisional, modernis, atau neo-modernis. "Secara sederhana, Post Tradisionalisme dapat dipahami sebagai gerakan lompat tradisi, menuju pada tradisi baru," tulis Marzuki. Itulah liberalisme yang terjadi pada NU.

Marzuki mencontohkan lompatan tradisi pada Masdar Farid Mas'udi. Wakil Katib Syuriah PBNU ini mengaggas pelaksanaan haji lebih dari sekali dalam setahun. Sehingga potensi mudarat akibat membludaknya jamaah haji

bisa tercegah. Masdar juga punya pendapat beda tentang zakat lewat buku *Agama Keadilan*. Hasil ijtihad Masdar, menurut Marzuki, tidak punya rujukan dalam tradisi. Tapi, proses ijtihadnya memakai metode dalam tradisi klasik, yaitu *ushul fiqih*.

Postras pelan-pelan mengkristal sebagai identitas liberalisme pemikiran kalangan muda NU. Meski mereka sadar, bangunan epistemologisnya belum jadi. November 2001, ISIS menerbitkan jurnal ilmiah edisi perdana dengan nama *Posttra*. Makin lengkaplah guliran predikat baru itu.

Pada perkembangannya, Postra seperti berhadapan dengan Islam liberal (Islib). Diskusi bertajuk "Mendialogkan Post Tradisionalisme Islam dan Islam Liberal dalam Gairah Baru Pemikiran Islam di Indonesia", 14 November lalu, di Jakarta, berisi perdebatan yang mengukuhkan penghadapan itu. Postra dikesankan sebagai lanjutan Islam tradisional. Islib dicitrakan sebagai pewaris Islam modernis.

Ketua LKiS, Jadul Maula, menilai sia-sia penghadapan dua kubu itu. "Nggak usahlah, model penghadapan Postrad dan Islib seperti itu tidak produktif," katanya kepada Kristiyanto dari GATRA. "LKiS melihat dialektika keduanya untuk pengayaan wacana," ujar Jadul. Sebenarnya, kata Jadul, Islib atau Postra sama-sama produk modernitas. Hanya titik tolaknya yang berbeda. □



ASRORI S. KARNI

KHOLIS BAHTIAR BAKRI

Misalnya kasus yang menimpa intelektual Mesir, Nasr Abu Zayd. Ia terpaksa diasingkan ke Belanda oleh Universitas Al-Azhar, karena pemikiran-pemikirannya yang kontroversial. Yang tragis adalah nasib Mahmud Mohammed Taha. Intelektual Sudan ini dihukum mati oleh pemerintah fundamentalis Sudan.

Intelektual liberal, seperti Ahmad Khalafallah, Najib Mahfouz, Fuad Zakariyya, Muhammad Syahrour, dan Hasan Hanafi, malah mengalami beberapa pelecahan. Akibatnya, mereka tak punya ruang gerak untuk berekspresi sesuai dengan keyakinannya. Tidak aneh, di antara mereka ada yang pindah ke negara-negara Barat. Mohammed Arkoun, misalnya. Pemikir asal Aljazair ini kini menetap di Prancis.

Di Indonesia, gagasan Islam liberal yang pernah dirintis, antara lain, oleh Nur-cholish Madjid, Harun Nasution, Munawir Sjadzali, dan Abdurrahman Wahid juga mengalami nasib serupa. Mereka mendapat kecaman dan tuduhan sesat, bahkan dianggap sebagai agen zionis yang ingin merusak Islam.

Walau pengalaman mereka tak seburuk yang dialami intelektual Islam liberal di kawasan Timur Tengah, menurut Ulil Abshar Abdalla, gagasan Islam liberal sebenarnya telah gagal. Bahkan gagal total. Buktinya, tidak ada yang bisa diperbuat para intelektual Islam liberal Indonesia kala kekerasan atas nama agama terus berkecamuk.

Bahkan, fundamentalisme dan ekstremisme agama kini makin kuat. Kegagalan Islam liberal ini, menurut Ulil, antara lain karena tidak adanya pengorganisasian secara sistematis. Berbeda dengan kelompok fundamental yang memiliki infrastruktur jaringan umatnya yang solid dan sudah terbangun lama.

Dalam pandangan Lutfi Assyaukanie, gerakan Islam liberal saat ini terlalu elitis, dan tidak mengakar ke masyarakat bawah. Pada masa awal kebangkitan Islam liberal, pemegang isu-isu pembaruan adalah tokoh-tokoh agama yang memiliki otoritas dan berpengaruh di masyarakat, seperti Muhammad Abduh, Ali Abd al-Raziq, dan Qasim Amin.

Kini, gagasan itu lebih banyak dibawa kalangan akademisi dan peneliti, yang tak mengakar di masyarakat. Akibatnya, masyarakat merasa asing dengan isu-isu pembaruan. Bahkan, mereka menjadi reaktif karena menerima doktrin bahwa gagasan Islam liberal itu sesat. Sepertinya, perlawanan Islam liberal akan berhenti di tengah jalan kalau sekadar gerakan pemikiran. □